

# NEWSLETTER

LP3Y Ford Foundation

SEPTEMBER kali ini seperti September tahun lalu (2009): berlangsung ritus sosial-kultural Idul Fitri. Pemandangan yang sama berulang kembali, antara lain keberjубelan para pemudik di angkutan umum masal bernama kereta api, antrian pembeli karcis di stasiun keretaapi, kemacetan kendaraan bermotor yang mengular di jalan yang menghubungkan Jakarta dengan Jawa Tengah-Jawa Timur, dan tentu saja lalu lintas Jakarta yang begitu saja menjadi lengang dari lalu lalang dan kemacetan.

Pemandangan seperti itu menghiasi halaman-halaman surat kabar dan tayangan televisi hampir setiap hari selama sepekan sebelum dan sesudah Idul Fitri. Apalagi hampir semua televisi dan surat kabar memberi ruang khusus bagi momen ritus tahunan ini, bahkan menjadikannya program liputan khusus.

Bagi media, peristiwa momentum seperti itu tentulah memiliki nilai berita, sangat layak untuk dijual sebagai komoditas industri media. Meskipun, tak sedikit dari peristiwa itu sesungguhnya tak lebih dari pengulangan dari tahun-tahun sebelumnya, yang membedakan hanya para pelaku dan waktu.

Namun, dalam melihat dan menghadirkan ritus tahunan itu media tampaknya lebih asyik dengan peristiwa di permukaan. Kemacetan yang timbul di mana-mana, dan sebaliknya pada hari Idul Fitri tiba-tiba Jakarta berubah senyap jauh dari hiruk pikuk kendaraan dan apalagi kemacetan, dipotret media apa adanya.

Potret kemacetan yang dihadirkan media tak hanya di sekitar Idul Fitri. Kemacetan di Jakarta yang makin parah hampir menjadi sajian rutin media. Akan tetapi, sekali lagi media tak menghadirkan apa yang sesungguhnya terjadi di sebalik realitas ini.

Bahwa kemacetan sesungguhnya hanya salah satu manifestasi dari “kemenangan” kekuatan kapital, melalui

bisnis kendaraan bermotor, atas kepentingan publik nyaris tak dihadirkan media ketika memaparkan realitas kemacetan lalu lintas.

Bukankah kemacetan terjadi karena kendaraan, terutama milik pribadi, terus bertambah? Di satu sisi, makin banyaknya



Peserta Pelatihan Koran warga ketika berlatih wawancara

warga memiliki kendaraan bermotor menunjukkan adanya peningkatan kemampuan ekonomi warga. Namun, penting dicatat bahwa iming-iming berbagai kemudahan mendapat kendaraan bermotor dibarengi promosi gencar secara terus menerus di media merupakan senjata ampuh dari kekuatan kapital, yang ternyata efektif mendorong masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor pribadi.

Di sisi yang lain, pemerintah atau negara seakan-akan setengah hati menyediakan fasilitas angkutan massal yang nyaman, aman, mudah diakses dan tepat waktu bagi publik. Masyarakat pun jadi punya alasan untuk memilih tawaran dari kekuatan kapital, yaitu perusahaan otomotif. Pembatasan pemilikan kendaraan pribadi, menaikkan pajak kendaraan pribadi dan tarif parkir secara progresif, pun tak lebih sebatas wacana agar pemerintah tampak seolah-olah melakukan sesuatu mengatasi persoalan kemacetan.

Akar persoalan itu, sekali lagi, luput atau sengaja dihindari oleh media. Bukankah media pun memetik keuntungan melalui iklan otomotif yang digelontorkan kekuatan kapital? Padahal, media diharapkan menjadi salah satu pihak yang berada di posisi terdepan untuk mengingatkan semua pihak atas kecenderungan hegemoni kekuatan kapital yang sedikit demi sedikit menggeser dan menganggangi kepentingan publik.

Tentulah tak salah dengan liputan permukaan semacam itu. Namun, menggali fakta lebih dalam dan menghadirkannya ke publik demi kesadaran publik akan jauh lebih baik. Bukankah salah satu fungsi media adalah edukasi. (*ded*)



Cara mendapatkan NEWSLETTER LP3Y: Kirimkan identitas serta nama media Anda, akan kami kirimkan secara gratis. Informasi yang kami muat di NEWSLETTER dapat dikutip atau disiarkan tanpa ijin asal menyebutkan sumber. Apabila anda memiliki informasi tentang HIV/AIDS yang layak untuk disebarkan kepada masyarakat luas, silakan kirim dan akan kami muat. Anda dapat menghubungi kami ke alamat: LP3Y Jl. Kaliurang Km 13,7 Ngemplak, Sleman, Yogyakarta 55584 atau via telepon dan faksimili No. (0274)896016, email: lp3y@idola.net.id dan situs <http://www.lp3y.org>

Penanggung Jawab : Ashadi Siregar Pimpro/Pemimpin Redaksi : Slamet Riyadi Sabrawi Staf Redaksi : Ismay Prihastuti, Masduki, Rondang Pasaribu, Agoes Widhartono, Dedi H Purwadi Sekretaris Redaksi : W. Nurcahyo



# PERTEMUAN KORAN WARGA



Saat pelatihan di rumah Umi Narsih

PELATIHAN peserta pengelola koran warga untuk kali ini agak berbeda. Berbedanya, pelatihan atau pertemuan diselenggarakan di rumah salah satu peserta yakni Umi Narsih, biasanya memang pelatihan dilakukan di kampus LP3Y. Pelatihan yang dilaksanakan pada Senin, 4 Oktober 2010 memang sudah direncanakan pada Agustus lalu.

Tepatnya di Dagen RT 06 Kadisoro, Gilangharjo, Pandak, Bantul, rumah Umi berada. Ruang pelatihan yang semula merupakan ruang gamelan, diubah menjadi ruang pelatihan. Tidak terlalu luas, namun untuk menampung peserta yang hanya berjumlah empat orang, ditambah fasilitator tiga orang, lebih dari cukup.

Materi yang disajikan pada pertemuan dari pukul 10.00 hingga 16.00 masih tentang melipat dan wawancara. Namun kali ini disertai praktek atau simulasi sederhana.

## Berlatih Wawancara

Tidak jauh dari tempat pelatihan, ada sebuah usaha konveksi pakaian, tepatnya bernama 'Modiste Aida'. Sebagai gambaran, usaha konveksi ini mempunyai beberapa mesin jahit dan mesin obras, serta 12 pegawai. Untuk lebih jauh mengetahui sejarah perkembangan usaha konveksi tersebut, dan saat pertama usaha dirintis dengan hanya bermodalkan satu mesin jahit, peserta diminta untuk melakukan wawancara terhadap si pemilik konveksi.

Sebelum terjun ke lapangan fasilitator memberi arahan, fakta apa saja yang akan digali kepada narasumber. Selain itu, tujuan tulisan atau laporan yang akan ditulis peserta mengacu pada pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan kepada narasumber nantinya.

Meski pun salah satu peserta terbilang punya hubungan kerabat terhadap pemilik konveksi, hal itu juga menjadi catatan bahwa terlepas dari semua itu pewawancara diminta



Peserta saat berlatih wawancara dengan pengusaha konveksi

kritis atas pertanyaan yang diajukan. Dari sinilah pembahasan tentang posisi pewawancara disinggung bahwa pewawancara atau wartawan harus dapat menempatkan diri sebagai pewawancara meskipun narasumber juga punya ikatan emosi dengan pemilik konveksi.

Pertanyaan kritis dan terbuka, konfirmasi akan informasi yang belum diketahui jelas dari narasumber dibutuhkan dalam teknik wawancara ini. Selain itu juga bekal *list* pertanyaan yang sudah ada di kepala masing-masing peserta. Sehingga ketika bertemu dengan narasumber, wartawan atau pewawancara tidak lagi perlu harus terus menilik catatan pertanyaannya tetapi hal itu sudah dikuasai oleh pewawancara. Namun, sebagai latihan, pertanyaan yang dimiliki peserta boleh saja dibawa agar fakta yang akan digali tidak terlupa.

Di sisi lain, semula sebenarnya fasilitator berencana akan melakukan simulasi wawancara antar peserta. Namun karena jumlah peserta yang hanya empat orang, sehingga simulasi dibatalkan.

Simulasi wawancara akhirnya dilakukan oleh salah satu fasilitator yakni Agoes Widhartono terhadap salah satu peserta pelatihan. Agoes secara langsung menunjukkan bagaimana proses ketika berhadapan langsung dengan narasumber, bagaimana seorang wartawan bersikap terhadap narasumber.

Salah satu peserta pengelola koran warga memang sengaja dijadikan narasumber untuk ditulis sebagai bahan *newsletter* LP3Y dalam rubrik profil. Dalam simulasi yang dilakukan tersebut diharapkan peserta mendapat pengetahuan atau tahu tentang teknik wawancara secara langsung.

Setelah para peserta mengamati proses wawancara tersebut, salah seorang peserta, Dwi kemudian menilai bahwa teknik wawancara yang diperagakan atau dilakukan Agoes, sangat rileks tidak kaku. Sehingga terkesan narasumber hanya



Pelatihan di rumah Tien Ratmanto di Dusun Joho, Jambidan, Banguntapan, Bantul

diajak berdiskusi atau berbicara biasa. Padahal dibayangkan Dwi, wartawan akan melakukan proses wawancara itu dengan tegang. Ini sisi lain dari sebuah latihan langsung yang bisa dilihat oleh peserta.

Dengan persiapan yang matang, berbekal teknik dan panduan yang disusun oleh tim, akhirnya para peserta berlatih wawancara menuju lapangan. Karya atau tulisan sebagai tugas dari wawancara itu adalah berupa tulisan individu dengan sudut pandang yang bisa sama atau berbeda.

Dalam latihan ini fasilitator berharap peserta mampu menangkap fakta dan menuliskannya menjadi satu berita yang utuh. Tulisan bisa berupa *feature* (berita kisah) tentang profil usaha konveksi atau cerita lain tentang usaha itu. Selamat berlatih. (may)



# KELUARGA BERENCANA, MURI DAN PERSOALAN PEREMPUAN

BEBERAPA berita tentang pemasangan IUD (*Intra Uterine Device*) dijadikan rekor MURI menjadi perhatian sekaligus menimbulkan pertanyaan penulis. Pertama, persoalan pengendalian penduduk yang melibatkan banyak pihak yang menjadi ajang bergengsi untuk penghargaan MURI (Musium Rekor Indonesia).

Kedua, media mengungkap fakta tersebut layaknya peristiwa lainnya, tanpa menggunakan perspektif lainnya. Sehingga terkesan peristiwa tersebut sebagai hal biasa, padahal ada persoalan mendalam dari peristiwa itu, terlebih lagi menggunakan tubuh perempuan sebagai sarana pemenuhan tujuan atau target politisasi. Terkesan sepele, tapi sesungguhnya menimbulkan banyak pertanyaan.

Berita yang dimuat *Kedaulatan Rakyat* (KR) tentang masalah ini memang tidak baru karena terjadi beberapa bulan lalu. Namun fenomena tentang itu dapat berlanjut atau menjadi contoh bagi daerah lainnya. Seperti misalnya yang dimuat KR edisi 28 April 2010, melalui situs online-nya [www.KRjogja.com](http://www.KRjogja.com) yang berjudul "Program KB Jateng Raih MURI".

Secara singkat isi berita tersebut tentang penghargaan MURI yang diberikan kepada provinsi Jawa Tengah atas prestasi memberi pelayanan pemasangan IUD kepada 17.256 akseptor Keluarga Berencana (KB) serentak selama dua hari 25-26 April 2010 di 35 kabupaten/kota. Jumlah tersebut dianggap rekor baru dan terbesar dibandingkan provisi lain di Indonesia pada saat itu.

Setelah hampir dua bulan berita tersebut, di media berbeda turun berita tentang pemasangan IUD di provinsi Jawa timur (Jatim), tepatnya diberitakan bulan Juni. Dalam situs [www.malang-post.com](http://www.malang-post.com) edisi 30 Juni 2010, berita yang hampir sama berjudul "Ketika Kota Malang Pecahkan Rekor MURI KB IUD Terbanyak". Isi beritanya pun tentang target provinsi Jatim berusaha untuk memecahkan rekor MURI untuk akseptor KB IUD terbanyak di Indonesia, dan Kota Malang mendapat target 255 orang untuk target keseluruhan provinsi Jatim sebanyak 40 ribu orang akseptor.

Selanjutnya, memang akhirnya Jatim berhasil mendapat penghargaan MURI atas prestasinya yang melampaui provinsi Jawa Tengah. Sebanyak 21.891 orang atau perempuan menjadi akseptor IUD dan kondisi ini disampaikan dengan bangga oleh Nina Soekarwo sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dalam acara memperingati Hari Keluarga Nasional ke XVII

di Lapangan Wira Mandala, Kabupaten Tulung Agung Jawa Timur pada Juli 2010 ([www.harianbrawijaya.com](http://www.harianbrawijaya.com)).

## Media meliput KB

Ketika membaca berita di atas dengan seksama, tidak ada yang keliru dengan berita yang dibuat sang jurnalis. Jurnalis telah melakukan tugasnya sesuai dengan kaidah jurnalistik. Namun, hal ini media hanya bertindak seperti jurnalisme pemadam kebakaran. Artinya, jurnalis hanya meliput fakta jika ada peristiwa. Jurnalis hanya mampu memberitakan berdasarkan beberapa unsur layak berita, seperti misalnya *significance*, bagi daerah sekitar karena media tersebut berada di daerah sekitar. Atau juga unsur *prominence*-nya karena ada seorang tokoh terkenal pada peristiwa itu. Hanya itulah kemampuan jurnalis dalam melihat banyak fakta di lapangan.

Sadar atau tidak ketika jurnalis meliput peristiwa tersebut termuat unsur kepentingan politisasi. Unggulnya suatu daerah akan pelayanan KB IUD karena mampu pecahkan rekor MURI, dan punya akses pada pengendalian penduduk daerah tersebut.

Sebetulnya jika dicermati isi berita secara keseluruhan, ada beberapa hal yang menjadi catatan penulis. Pertama, banyak fakta dalam wawancara jurnalis yang dapat dieksplorasi lebih jauh. Misalnya, dalam berita *Malangpost* diketahui dari salah satu narasumber bahwa tidak mudah menjangkau akseptor IUD yang informasi ini diketahui dari Kepala BKBPM Kota Malang, Jarot Edi Sulistyono.

Tapi sayang, pernyataan narasumber tersebut tidak digali. Seperti misalnya pernyataan tentang menjangkau akseptor dengan ketidakmudahan. Mestinya dapat dilanjutkan lagi dengan pertanyaan, seperti apa ketidakmudahan tersebut? Meskipun si narasumber juga mengatakan bahwa salah satu cara mengajak akseptor baru dengan mengajak akseptor lama yang telah lebih dulu menggunakannya.

Belum lagi Jarot Edi Sulistyono pun mengatakan bahwa pemecahan rekor MURI ini tidak ada pola pemaksaan. Jika tidak ada paksaan, apa yang didapat dari banyak akseptor tersebut? atas kesadarannyakah atau ada imbalannya?

Kedua, jurnalis yang meliput berita ini tidak sensitif gender. Jika jurnalis sensitif terhadap persoalan ini mengapa tidak tanya langsung kepada Petugas penyuluh yang bertugas menjangkau akseptor, bukan kepada kepalanya. Atau



## Analisis Info

seperti diberitakan banyak perempuan paro baya dan PNS berseragam coklat yang menunggu untuk ikut program KB ini, sesungguhnya dapat ditanyakan apakah ini kesadarannya atau ada tekanan tertentu?

Ketidakpekaan jurnalis terhadap persoalan ini membuat berita ini terasa datar dan kering. Padahal jika digali dari fakta yang tersedia, informasi mengenai ini dapat menjadi lebih mampu menggambarkan ada persoalan lain dibalik peristiwa itu yakni ada persoalan perempuan dan Hak Asasi Manusia.

Ketiga, jika jurnalis peka terhadap persoalan ini dan mengikuti perkembangan layanan KB IUD yang menjadi ajang rekor MURI yang sebelumnya dimenangkan oleh provinsi Jateng, mungkin pertanyaannya menjadi lain. Apa hubungannya MURI dan KB? Mengapa KB dijadikan ajang rekor MURI? Adakah aspek politisasi dalam peristiwa itu? Apakah suatu daerah ingin menjadi yang unggul dalam hal ini terbanyak menjaring akseptor KB IUD dalam rangka pengendalian penduduk di antara provinsi lainnya.

Jika ini menjadi fenomena, alangkah “ngeri” bagi penulis membayangkannya. Karena jika ini menjadi ajang bergengsi maka kegiatan atau pencarian akseptor KB IUD akan diikuti provinsi-provinsi lainnya. Kengerian tersebut bertambah membayangkan sekian puluh ribu atau ratusan ribu bahkan jutaan perempuan menjadi alat atas pemenuhan target yang tidak disertai informasi seperti apa nasib perempuan yang menjadi target tersebut.

Sayangnya gambaran yang diinginkan pembaca untuk lebih jauh tahu tentang itu tidak didapat dari media. Media hanya memberitakan perempuan sebagai peserta IUD, dan itupun hanya satu peserta saja yang diwawancarai oleh jurnalis. Padahal banyak alasan yang menyebabkan perempuan enggan pasang IUD, karena efek samping dan harus ditanam dalam rahim oleh tenaga medis.

### Perempuan jadi korban

Bila mencermati persoalan atas berita di atas, banyak yang dapat dipertanyakan. Misalnya, mengapa pelayanan KB IUD untuk Rekor MURI? Mengapa tidak kondom atau vasektomi yang dipecahkan sebagai rekor MURI?

Beberapa tahun lalu sekitar tahun 2004, harian *Suara Merdeka* pernah memberitakan perkumpulan atau paguyuban laki-laki ber-KB vasektomi dengan nama Priyo Utomo. Paguyuban yang berada di Desa Gentong, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali secara resmi didirikan 7 Maret 1987.

Dari berita tersebut sebenarnya vasektomi pun bisa dijadikan “alat” pengendalian kelahiran. Atau juga kondom, meski metode penggunaannya tidak langsung dipakai dan terlihat, namun cara ber-KB lain yang tidak melulu menggunakan tubuh perempuan. Dengan kata lain metode ber-KB untuk laki-laki dapat mulai lebih dipopulerkan.

IUD identik dengan perempuan, karena tubuh perempuan dijadikan tepat atau alat mencapai tujuan. Jika secara sadar dan sukarela perempuan menggunakan alat kontrasepsi tersebut, tidak masalah. Persoalan yang timbul jika ada rasa ketidakrelaan dan ketakutan tersembunyi karena tidak berani diungkapkan. Sehingga sesungguhnya dalam ajang MURI tersebut terkandung unsur keterpaksaan terselubung.

Dalam hal ini lagi-lagi perempuan menjadi korban. Mengingat jumlah untuk memecahkan rekor tersebut sangat banyak yakni 21.161 perempuan yang dilibatkan dalam ajang MURI tersebut.

Lagi-lagi timbul pertanyaan, apakah semua perempuan tersebut dengan suka rela menjadi peserta KB atau ada iming-iming tertentu? Mengingat tidak semua perempuan cocok dengan alat tersebut, sehingga pertanyaan lanjutnya apakah tidak ada keluhan setelah menjadi akseptor KB IUD? Jika hanya kuantitatif saja yang dibutuhkan, sehingga setelah itu mereka melepas kembali IUD-nya, ini semakin mengandung unsur kebohongan, karena ada cara-cara “kotor” ingin menjadi yang terbaik.

Sementara itu, masih banyak alat kontrasepsi yang tidak melulu mengorbankan tubuh perempuan, karena

tidak semua perempuan cocok dengan KB IUD. Mengingat efek sampingnya, dari pemasangan menimbulkan rasa tidak enak di perut, perdarahan per vaginam atau spotting dan infeksi. Sedangkan efek samping dari penggunaan yakni perdarahan yang banyak, kram, infeksi, kemandulan, dan kebocoran rahim. ([www.kesrepro.info](http://www.kesrepro.info))

Untuk itu media dalam memberikan informasi semestinya dapat membantu pembaca, terutama ada unsur edukatif yang terselip dari berita-berita tentang KB. Selama ini media hanya memberitakan peristiwa yang lebih mengedepankan angka dan sensasi. Sehingga pembaca seringkali bertanya-tanya akan sesuatu yang tidak jelas dan tidak mendapatkan makna “lebih” dari berita itu.

Idealnya media tidak hanya melemparkan fakta-fakta yang berserakan begitu saja. Dibalik berita yang dimunculkan oleh media diupayakan dapat membangun wawasan dan menjadikan pembaca tahu akan persoalan sebenarnya. Sehingga berita tidak menimbulkan pertanyaan atau dugaan bagi pembacanya. (*ismay prihastuti*)

“  
**Sebetulnya jika  
dicermati isi berita  
secara keseluruhan,  
ada beberapa hal  
yang menjadi  
catatan penulis.**  
”



# KEMACETAN, ANGKUTAN MASSAL, DAN INFRASTRUKTUR

APABILA disimak, hingga minggu ketiga bulan September ini halaman pertama surat kabar Harian *Kompas* hampir setiap hari memuat berita tentang tiga isu: kemacetan, transportasi massal tidak memadai, serta kondisi infrastruktur yang mengkhawatirkan.

Dua isu pertama menjadi berita halaman pertama karena bertepatan dengan ritual tahunan mudik lebaran. Hari Raya Idul Fitri jatuh tanggal 11 September 2010. Seminggu menjelang lebaran, arus mudik meningkat, menimbulkan kemacetan lalu lintas di mana-mana. Seminggu kemudian arus balik menyebabkan kemacetan serupa.

Yang menarik, berita kemacetan yang dimuat *Kompas* pada halaman pertama tidak semata terkait peristiwa mudik lebaran. Di antara berita arus mudik lebaran yang sejak tanggal 1 September muncul secara teratur pada halaman pertama harian ini, ada dua berita mengenai kemacetan di Jakarta. Pertama, berita tentang kesediaan pemerintah pusat mendukung Pemerintah Provinsi DKI untuk mengatasi kemacetan lalu lintas (*Kompas*, 3/9/10). Kedua, berita berisi tawaran solusi Presiden SBY untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Ada tiga solusi yang ditawarkan. Salah satunya, memindahkan ibukota. (*Kompas*, 4/9/10).

Kemudian, infrastruktur menjadi berita terkait peristiwa amblasnya jalan sepanjang 103 dan lebar 4 meter, dengan penurunan sedalam 7 meter, di Jl. RE Martadinata, Jakarta Utara (*Kompas*, 17/9/10). Amblasnya jalan utama ekonomi penghubung pelabuhan Tanjung Priok dan Jakarta ini diduga disebabkan abrasi air yang mengikis tanah di bawah konstruksi jalan. Tanah yang terkikis meninggalkan rongga, jalan lantas amblas.

Tiga isu di atas menjadi titik tolak paparan berikut. Pandangan yang hendak diketengahkan yaitu bahwa salah satu sebab yang menimbulkan persoalan terkait ketiga isu tersebut adalah ketidaksadaran atas keberhasilan kekuatan kapital memengaruhi semua pihak, baik warganegara maupun pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan bersama di ruang publik. Pengaruh buruk kekuatan kapital itu diasumsikan tidak sampai luput dari perhatian bersama, apabila media massa, melalui laporan para jurnalisnya, selalu mengingatkan bahwa merupakan sifat dasar kekuatan kapital adalah meraih untung.

Perlu dicatat bahwa pemberitaan oleh Harian *Kompas* sebagaimana dikemukakan di atas hanya dijadikan contoh dan sekaligus melatarbelakangi tulisan ini. Harian lain, begitu

pula media televisi, sudah tentu juga memberitakan persoalan serupa.

## Naik turun kelas

Berbicara tentang kemacetan, tak soal apakah kemacetan itu di Jakarta atau terjadi saat arus mudik menjelang lebaran maupun arus balik sesudahnya, akar persoalannya jelas. Jumlah kendaraan pribadi terlalu banyak, tidak sebanding dengan panjang maupun lebar jalan sebagai infrastruktur pendukung, sedang angkutan massal tidak tersedia dalam jumlah maupun kondisi yang memadai.

Naik kendaraan pribadi tentu menjadi pilihan bagi banyak orang. Tidak perlu berdesakan di bis atau kereta api yang kebanyakan tidak menawarkan kenyamanan serta keamanan.

Lagi pula, memiliki kendaraan pribadi merupakan pembuktian atas keberhasilan dalam kehidupan sosial. Ada proses peningkatan status sosial di sana. Jika sebelumnya tidak mempunyai kendaraan, kini punya sepeda motor. Jenjang lebih tinggi dicapai saat mampu memiliki mobil. (Lihat Haryatmoko, *Dominasi Penuh Muslihat*, Gramedia, 2010). Singkat kata, memiliki kendaraan menjadi sarana dalam perjuangan identitas.

Kebutuhan pembuktian diri berdasarkan paham semacam itu tidak luput dari perhatian kekuatan kapital. Bahkan tidak sedikit pengamat mengemukakan pendapat bahwa kekuatan kapital memang sengaja membiuskan paham tersebut sehingga menjadi keniscayaan bagi kebanyakan orang. Nalarnya jelas. Begitu orang menjadi konsumtif, terbuka peluang bagi kekuatan kapital untuk meraih untung. Sebab, ketika orang meyakini bahwa memiliki kendaraan pribadi merupakan bukti atas keberhasilan mencapai kelas sosial yang lebih tinggi, saat itu pula kekuatan kapital bisa menjual sepeda motor atau mobil.

Maka berbagai jurus bisnis kendaraan diterapkan dengan cerdas. Walau belum mempunyai uang sejumlah harga kendaraan, orang boleh memiliki kendaraan secara kredit. Asalkan mampu menyediakan uang muka sekitar 5 % dari harga resmi, serta menyatakan sanggup menyetor angsuran secara disiplin setiap bulan selama 3 - 4 tahun, orang bisa memiliki sepeda motor baru. Begitu pula jika ingin mempunyai mobil. Tidak cuma itu. Agar mendapat pengakuan sebagai perantau yang berhasil, tersedia kendaraan yang bisa disewa untuk dipakai selama beberapa hari saat mudik lebaran.



## Spesial Info

Dengan modus bisnis kekuatan kapital yang sangat memanjakan sikap konsumtif semacam itu, tidak mengherankan apabila kemudian jalan-jalan penuh sesak kendaraan pribadi, sepeda motor atau mobil. Tapi jalan yang sesak dan macet itu bukan urusan kekuatan kapital. Menyediakan infrastruktur yang bernama jalan dan mengatur agar lalu lintas tidak macet adalah urusan pemerintah.

Juga bukan urusan kekuatan kapital manakala kemacetan di Jakarta sudah tak tertahankan lagi sampai-sampai presiden negeri ini mencetuskan saran lebih baik ibukota dipindahkan saja.

Kekuatan kapital akan tetap membiuskan paham bahwa memiliki kendaraan sendiri lebih bergengsi. Kekuatan kapital mengetahui betul bahwa seperti kebanyakan orang, aparat pemerintah di negeri ini sangat mengindahkan citra diri. Aparat pemerintah juga melihat kendaraan pribadi sebagai simbol status, sebagaimana bisa dilihat di areal parkir setiap kantor pemerintah.

Terlebih lagi, para penentu kebijakan itu masih mendewakan dogma pertumbuhan ekonomi, sehingga takut berseteru dengan kekuatan kapital. Begitu ada yang melontarkan wacana pembatasan kepemilikan kendaraan pribadi, kekuatan kapital akan berteriak bahwa langkah tersebut akan menghambat laju pertumbuhan industri otomotif yang dengan sendirinya bisa menjadi ancaman terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional. Bisa ditebak, dengan sikap itu, tak bakal ada aturan pembatasan pemilikan kendaraan pribadi, dan itulah yang menjelaskan mengapa penyediaan transportasi massal tak mendapat perhatian yang sungguh-sungguh.

Dan yang terjadi kemudian adalah ironi. Dulu, orang bisa naik sepeda motor sendiri dianggap naik kelas. Kini, di Jakarta, kalau ada seseorang yang biasanya naik mobil pribadi ke kantor tiba-tiba beralih naik sepeda motor, itu bukan berarti turun kelas, melainkan agar bisa lebih cepat sampai ke tempat kerja. Bahwa dengan demikian jumlah kendaraan di jalanan semakin banyak sehingga kemacetan semakin menjadi-jadi, tak ada yang peduli. Semua bertarung mendahulukan kepentingan diri sendiri.

### **Kepentingan publik vs kekuatan kapital**

Peristiwa arus mudik lebaran dengan segala suka-dukanya – entah itu kemacetan yang timbul atau banyaknya kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebagai peristiwa musiman, senantiasa mendapat tempat pemberitaan media massa. Kemacetan yang setiap hari terjadi di Jakarta, begitu pula di sejumlah kota besar lainnya, demikian pula.

Pemberitaan tersebut paling tidak menunjukkan kepedulian media massa atas kepentingan publik. Melalui pemberitaan semacam itu, media massa mengingatkan agar pemerintah berupaya lebih keras untuk mengatasi persoalan kemacetan yang hingga kini belum juga terpecahkan.

Akan tetapi ada hal yang terlewatkan media massa. Selama ini merupakan kenyataan bahwa anggaran negara

untuk membangun infrastruktur jalan terbatas adanya. Padahal, proyek pembangunan jalan sama sekali tidak menarik para investor.

Di sisi lain, penyediaan transportasi massal tidak mendapat perhatian. Selain karena bukan merupakan bisnis yang menggiurkan, juga terkendala sikap kebanyakan orang merasa lebih bergengsi apabila naik kendaraan pribadi.

Di mana pun di dunia ini, pembangunan infrastruktur seperti jalan jelas memerlukan waktu lama. Tak soal seandainya pemerintah mempunyai uang cukup atau ada investor yang bersedia menanamkan modalnya untuk proyek tersebut. Pembebasan lahan, pekerjaan konstruksi jalan, bisa memakan waktu tahunan. Sedangkan sepeda motor atau mobil, berkat bantuan robot, bisa diproduksi dalam hitungan hari. Jadi, tidak mengherankan apabila pertumbuhan panjang maupun lebar jalan selalu tidak mampu mengejar pertumbuhan jumlah kendaraan.

Kenyataan tersebut menyebabkan bahwa pembatasan kepemilikan kendaraan pribadi disertai penyediaan transportasi massal yang nyaman merupakan keniscayaan. Kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan bersama seharusnya dilandasi pemahaman yang baik atas kenyataan tersebut.

Akan tetapi, seperti disinggung di atas, kekuatan kapital mampu menumpulkan kesadaran semua pihak atas semua itu. Di satu sisi, kekuatan kapital berhasil menyuntikkan bias kepada kebanyakan orang bahwa naik kendaraan pribadi lebih bergengsi, merupakan simbol status, sekalipun itu hanya menimbulkan kemacetan. Di sisi lain, kekuatan kapital berhasil meyakinkan penentu kebijakan bahwa pembatasan kepemilikan kendaraan pribadi menjadi ancaman bagi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pengangguran.

Hubungan sebab-akibat sebagaimana digambarkan itulah yang selama ini kurang ditampilkan media massa melalui laporan mendalam terkait dengan kemacetan, baik itu kemacetan saat arus mudik lebaran maupun kemacetan yang terjadi sehari-hari di Jakarta atau di sejumlah kota besar.

Sejak lama telah disadari bahwa di mana pun kekuatan kapital selalu berupaya memengaruhi kehidupan publik dan begitu pula selalu berupaya keras agar setiap kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah – kebijakan mana semestinya lebih mengutamakan kepentingan publik – senantiasa berpihak kepada kepentingan kekuatan kapital.

Dalam konteks itu, kiranya tidak berlebihan mengemukakan bahwa media massa diharapkan menjadi salah satu pihak yang berada di posisi terdepan untuk mengingatkan semua pihak atas kecenderungan kekuatan kapital tersebut. Dengan demikian, persoalan arus mudik, kemacetan lalu lintas, transportasi massal yang tidak memadai, tidak lagi dilihat semata-mata sebagai persoalan musiman atau penyakit kota besar. Melainkan sebagai persoalan yang berakar pada pertarungan antara kepentingan publik dan kekuatan kapital. (*rondang pasaribu*)



# KISAH PARA PEGIAT RAKOM

## MEWUJUDKAN CITA-CITA TAK CUKUP HANYA DENGAN SEMANGAT

BANYAK kisah menarik yang terselip dalam rutinitas sehari-hari. Termasuk ketika para warga desa berupaya membangun media komunikasi, dalam hal ini adalah radio komunitas (rakom).

Ada lima desa yang masuk dalam jejaring LP3Y-Ford Foundation, sebagai pegiat program Warga Bermedia, khususnya rakom. Lima desa itu adalah Jambidan, Srihardono, Gilangharjo, Mulyodadi dan Wonolelo, semuanya di Kabupaten Bantul.

Lima desa tersebut bersama-sama hendak mewujudkan impian mereka, untuk memiliki media komunikasi, yakni rakom. Memang, tidak semua (lima) desa itu belum memiliki rakom. Sebab, di dua desa, Jambidan dan Wonolelo, rakom sudah lebih dulu mengudara menyapa penduduk setempat, sebagai ajang sarana berkomunikasi, mendapat informasi sekaligus hiburan.

Di Desa Jambidan sudah ada Rakom Swadesi FM. Sedangkan di Wonolelo Sadewa SM. Mereka lebih dulu mengudara. Nah, dalam program ini, keberadaan dua rakom itu diharapkan lebih memantapkan diri, baik dalam program maupun kualitas siarannya. Sekaligus juga bisa membagi pengalaman, *sharing*, dan contoh kepada tiga desa lain yang belum memiliki rakom.

### Tercecer

Inilah kisah tercecer dari beragam aktivitas seiring dengan upaya para pegiat rakom yang masuk dalam program Warga Bermedia LP3Y-Ford Foundation.

Di Desa Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, misalnya. Sejak awal diadakan workshop soal ini, memang sudah muncul pertanyaan, apakah desa mereka perlu mendirikan rakom atau tidak. Sebab, tidak jauh dari desa itu, juga sudah ada radio komunitas, bernama Rakom Patas FM.

Meski pada awalnya alot, tetapi suara kesepakatan akhirnya didapat juga oleh para warga desa, melalui para pegiat rakom.

Betapa sibuk Subarno, salah satu pegiat Rakom di Mulyodadi, yang harus ke sana-ke mari, mendatangi tokoh masyarakat, mengatur strategi, menyusun jadwal termasuk menata kesiapan dirinya untuk setiap saat mengikuti workshop yang diadakan LP3Y, di Jalan Kaliurang, Yogya.

Awalnya, Subarno berinisiatif harus mendapatkan ketegasan warga Mulyodadi, yang intinya apakah mereka

memang berkehendak memiliki rakom sendiri, atau tidak. Kalau ya, maka harus dipersiapkan, dibangun sejak awal dengan baik. Kalau tidak, cukup “nebeng” mendengarkan Rakom Patas FM, yang berada di Desa Sidomulyo, tak jauh dari Mulyodadi. “Tapi, kalau kita tidak punya sendiri, bagaimana dengan acara di desa ini yang semestinya bisa disiarkan, apakah Patas mau menyiarkan, meski sama-sama satu kecamatan?” begitu pertanyaan, Tasim Suwoyo, seorang warga Mulyodadi yang aktif di berbagai kegiatan masyarakat.

Kemudian, digelarlah pertemuan penting untuk mendapatkan kepastian itu. Selasa sore sekitar pukul 13.30 hingga 16.00 WIB, bertempat di pendapa Balai Desa Mulyodadi, digelarlah rapat bersama warga setempat. Tujuannya agar didapat kesepakatan berdasar mufakat, soal perlu atau tidak desa itu mendirikan rakom. Sekitar 30 orang dari berbagai elemen di desa Mulyodadi hadir. Ada perangkat desa, ada kepala bagian kemakmuran, tokoh masyarakat, pemuda dan Karang Taruna. Satu orang wakil dari LP3Y hadir juga di sana.

Di tengah gerimis, setelah dialog dan tanya jawab, juga setelah warga memahami apa dan bagaimana rakom, akhirnya kesepakatan diambil, yakni Mulyodadi ingin memiliki radio komunitas sendiri. Sejak saat itulah, para pegiat rakom, Subarno dan Tasim, untuk menyebut contoh, termasuk pemuda yang lain, bahu membahu mempersiapkan. Mulai dari mengumpulkan tanda tangan dan *copy* KTP, menyusun proposal, mengajukannya ke notaris, menyepakati lokasi studio dan sebagainya. “Wah, memang *ribet*, melelahkan, kan orang banyak, macam-macam. Tapi juga menggembirakan. Saya bahagia sekarang akte notaris sudah di tangan, tinggal melangkah, lebih teknis supaya bisa siar,” ujar Subarno. Dokumen tercecer, *fotocopy* kurang, sebagai perlengkapan untuk mendapat akte notaris, pun terjadi di sana. Tapi itu tidak menyurutkan niat yang sudah tumbuh sejak awal.

Mereka juga terus mengikuti pertemuan yang diadakan rutin sebulan sekali dengan empat desa pengikut program ini, yang digelar LP3Y. Tempat pertemuan berganti-ganti. Kadang di desa Mulyodadi, kemudian Jambidan, lain kali di Wonolelo. “Sekaligus bisa saling silaturahmi,” tutur Marjudin, dari Sadewa FM.

### Diam emas

Hal serupa juga dialami pegiat rakom di Desa Srihardono. Dua pegiatnya, Sulis dan Okta, bahu membahu menyiapkan



## Info Kolaborasi

pendirian rakom. Tidak banyak cerita atau persoalan di sana, ibaratnya “diam berarti emas”. Dan nyatanya, kini di Srihardono sudah siap mendirikan rakom. Akte notaris sudah di tangan. Lokasi studio juga sudah ditetapkan. “Tinggal soal teknis, latihan termasuk penyiapan siar. Kami menanti bimbingan LP3Y,” ujar Sulis yang memang pendiam itu.

Boleh dibilang, Desa Srihardono memang bersiap mulai dari nol. Semua diawali benar-benar sejak awal. Beda tipis dengan Mulyodadi, yang tetangga desanya sudah mempunyai rakom (Patas FM di Sidomulyo). Akan halnya di Srihardono, sama sekali baru memulai. Tapi dengan semangat yang tinggi, cita-cita desa itu bermedia, memiliki rakom, tinggal selangkah lagi.

Kisah agak lain dialami Desa Gilangharjo. Mestinya, desa itu, dengan fokus di Dusun Kadisoro sudah memiliki rakom, karena sejak tiga tahun lalu sudah menyiapkan diri, juga sebagai dampingan LP3Y dalam program 2007. Tapi, entah mengapa, proses yang sudah mencapai pada pengumpulan tanda tangan dan *copy* KTP, terhenti di tengah jalan. Tahun ini, Kadisoro, kembali mengikuti program rakom. Karena sudah lama berjalan, tentu dokumen yang sudah dikumpulkan itu, ada yang sudah *out of date*. “Beberapa warga yang

menandatangani persetujuan pendirian rakom tahun 2007, sekarang ada yang sudah meninggal. Jadi, ya harus dicari lagi,” ujar Junjung, pegiat rakom di Kadisoro. Tanpa harus mencari-cari dan bertanya-tanya mengapa dokumen yang sudah disiapkan dulu kok macet, *toh* sekarang semangat pendirian rakom itu kembali menggeliat.

Menurut Junjung, alumnus Fakultas Geografi UGM itu, sebenarnya warga antusias memiliki media untuk berkomunikasi. Ia berharap, tahun ini segera terwujud. Para pegiat juga tak kendur semangat.

Maka ketika pada suatu kesempatan para pegiat rakom di lima desa itu mengikuti pertemuan rutin, dengan acara pelatihan dan studi lapangan di Rakom Sadewo 5 September 2010 lalu, mereka sangat antusias. Ada yang menyimak secara teknis, ada yang mendalami program. Para “senior”, artinya mereka yang lebih dulu berkecimpung dan memiliki rakom, antara lain Hendro Pleret dengan Swadesi FM dan Marjudin dengan Sadewa FM, memberi banyak hal, menularkan pengalaman dan ilmunya. Meski perjalanan masih jauh, tapi semangat para pegiat rakom itu tetap tinggi menyongsong cita-cita mereka. (*awd*)

---

---

# KEGIATAN IDEA

ISI surat undangan dalam *mailing list kolaborasiffbantul@yahooogroups.com* pada awal September sebagai berikut:

“IDEA menyelenggarakan CBO Network Meeting yang akan dihadiri oleh perwakilan JARAK Bantul, Jaringan Rakom, Jaringan SPTN HPS, REWANG, dan Jaringan BKM. Adapun tujuan dari pertemuan ini adalah memetakan permasalahan terkini dan rekomendasi terkait penganggaran daerah dan partisipasi. Kegiatan ini juga menjadi feeder kegiatan *set up project* IDEA dalam kerangka Kolaborasi LP3Y-IDEA-ASPPUK”.

Berikutnya disertakan juga undangan kegiatan tersebut yang ditandatangani oleh Wasingatu Zakiyah selaku Direktur IDEA. Berikut ini isi undangan tersebut:

Dengan hormat,  
Perhimpunan IDEA (*Institute for Development and Economic Analysis*) adalah suatu  
Non Governmental Organization di Yogyakarta yang bergerak untuk advokasi anggaran yang berbasis hak ekonomi, sosial,

dan budaya. Dalam kerangka tersebut, kami juga terlibat aktif dalam jaringan kerja-kerja advokasi anggaran di tingkat nasional bersama dengan NGO-NGO di berbagai propinsi di Indonesia.

Saat ini IDEA tergabung dalam Kolaborasi LP3Y-ASPPUK-IDEA sedang mendorong Pelembagaan Partisipasi dan Kebebasan Informasi Publik untuk Menjamin Akses Kelompok Marginal dan Kelompok Perempuan atas Sumber Daya Ekonomi dan Kebijakan Publik di Kabupaten Bantul.

Sebagai bagian dalam tahapan kerja tersebut kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam Pertemuan Jaringan Organisasi Komunitas yang akan diselenggarakan pada Senin, 27 September 2010, bertempat di Rumah Makan Parangtritis Jl. Parangtritis Km 9 Gabusan Bantul. Waktu kegiatan diselenggarakan pada pukul 08.30 – 13.00 WIB.

Demikian undangan tersebut dan itulah salah satu kegiatan yang diselenggarakan IDEA di bulan September.\*



## “WARTAWAN BERUSIA 100 TAHUN’ DINOBAHKAN SEBAGAI ‘PEKERJA TERTUA’ DI AMERIKA. “

WASHINGTON - Seperti banyak pekerja Amerika lainnya, Mildred Heath bangun jam 8 pagi, membaca berita, membuka mail box dan bersiap-siap untuk memulai hari kerjanya.

Sadar harga bahan bakar yang mahal dan lingkungan yang semakin tidak ramah, Heath mengambil rute yang paling efisien ke kantornya di Overton, Neb, dengan skuter listriknya.

Dan pada hari Jumat, dia merasakan efek dari seminggu kerja panjang di surat kabar Beacon-Observer - kadang-kadang ia hanya ingin tinggal di rumah sepanjang hari dan membaca.

“Saya menikmati pekerjaan saya dan saya berjanji untuk tinggal di dalamnya selama saya masih dibutuhkan,” kata Heath Wednesdaywith, janji yang sama yang pernah diucapkan saat ia sebagai wartawan 15 tahun di kota kelahirannya Curtis, Neb “Dan ternyata saat ini aku masih dibutuhkan.”

Heath kini dinobatkan dan dihormati sebagai pekerja tertua untuk tahun 2008 dalam sebuah konferensi pers yang diadakan oleh sebuah Organisasi Pekerja di pinggiran kota Virginia, yang memberikan pelatihan dan lapangan kerja bagi warga berusia lanjut yang ingin tetap bekerja setelah pensiun. *National Press Club*, yang menjadi tuan rumah konferensi pers juga menganugerahi Heath sebagai anggota kehormatan.

Pada acara itu juga menampilkan pekerja senior dari masing-masing negara bagian, yang semuanya berusia antara 65-100, yang masih bekerja setidaknya 20 jam seminggu pasca-pensiun, mereka semua diangurahi penghormatan sebagai pekerja-pekerja tertua di Amerika.

Heath kembali mendapat sorotan saat dia menceritakan beberapa pengalaman hidupnya saat berkarir di koran selama 85 tahun itu, seperti penanganan timah panas untuk mesin cetak koran kota asalnya pada tahun 1923, kemudian mencoba menerbitkan koran mereka sendiri, bernama Overton Observer

10 tahun kemudian. Tak lama setelah pindah ke Overton, Neb, Heath dan keluarganya membeli koran lokal di kota kecil, Elm Creek Beacon, dan kemudian menggabungkannya menjadi Koran yang lebih besar.

Beacon-Observer, kini dikelola oleh cucunya dan anak-angkatnya, koran di mana Heath menghabiskan sekitar 30 jam seminggu menjawab telepon, mengumpulkan berita

dari sumber, menyusun gambar dan membantu untuk mempublikasikan mingguan.

“Saya menikmati bisnis surat kabar, dan aku hanya cocok untuk bisnis ini,” kata Heath. “Bahkan ketika putri angkatku yang sarjana hukum dan mau bekerja di pengadilan, saya menolak dan menempatkan dia untuk bekerja di dalam bisnis surat kabar hingga saat ini.”

Heath bahkan mengambil buku catatan sendiri dan pena saat pesta ulang tahun ke-100 nya di bulan Januari, dan menjadikannya sebagai

“  
**Saya menikmati pekerjaan saya dan saya berjanji untuk tinggal di dalamnya selama saya masih dibutuhkan,**  
”

berita.

“Saya menulis dan terus menulis,” katanya. “Tapi, saya tidak membacanya. Aku mencoba untuk tidak membaca apapun yang saya rasa tidak perlu. Bukan karena saya tidak mau – tapi karena mata saya lelah “.

Heath juga mengomentari terhadap adanya *tren* penurunan bisnis surat kabar Amerika, dengan mengatakan bahwa ada keuntungan dengan adanya komputer, yang dia pelajari sendiri untuk menggunakannya pada awal media online. Dia bilang dia sangat suka tidak harus pergi mengirim gambar untuk dicetak - dan tentu saja, tidak harus menangani timah panas.

“Saya masih memiliki bekas luka, jadi ada keuntungan pasti sekarang – dengan adanya media online -,” kata Heath. “Yang jelas saya menikmati koran. Saya menikmati informasi. Saya tidak dapat membayangkan jika tidak ada hal-hal tersebut diatas. (Sumber: <http://news.medill.northwestern.edu>)



# PANDUAN BAGI (CALON) JURNALIS TELEVISI

MENJADI jurnalis televisi tampaknya diidamkan banyak orang. Peluang untuk tampil di layar kaca, memiliki akses dan kesempatan ke mana-mana, bertemu banyak kalangan, merupakan sebagian alasan orang meminati pekerjaan tersebut.

Namun tak semudah itu menjadi jurnalis televisi. Buku yang ditulis seorang jurnalis televisi yang telah bekerja di stasiun televisi swasta TPI selama 19 tahun – diawali reporter hingga kini *executive producer* – ini menunjukkan bahwa menjadi jurnalis televisi membutuhkan tak hanya kemampuan kreatif dan inisiatif melihat peristiwa dan masalah yang bisa diangkat jadi berita serta keuletan.

Dalam buku yang terbilang tak terlalu tebal ini, di bagian awal penulis menekankan pentingnya pemahaman mendasar mengenai berita televisi yang memiliki kekhasan dibanding berita media cetak maupun radio. Mengapa berita televisi, sebab sejatinya jurnalis televisi adalah jurnalis yang berurusan dengan berita untuk kebutuhan program berita di televisi. Adapun jurnalistik televisi menyangkut soal bagaimana berita televisi itu diproduksi.

Adapun ukuran yang sangat dipentingkan bagi berita televisi adalah aktualitas, meskipun berita televisi harus tetap mempertimbangkan unsur-unsur lain nilai berita (*proximity, prominence, magnitude, conflict, human interest*). Stasiun televisi yang kurang memerhatikan aktualitas sebuah berita cenderung memiliki *rating* atau tingkat kepemirsaan yang rendah di mata pemirsa (hal 7).

Bagi jurnalis televisi pemahaman tersebut tidak berhenti sebagai pengetahuan. Ia menjadi kerangka kerja jurnalis. Yang paling jelas, jurnalis atau reporter televisi tak hanya harus mengumpulkan fakta melainkan secara bersamaan dia harus memikirkan dan menentukan gambar apa yang harus direkam dan ditampilkan, bagaimana gambar dan narasi harus dihadirkan, bagaimana dan kapan dia muncul di depan kamera. Tak hanya itu. Reporter atau jurnalis televisi sekaligus berperan sebagai pimpinan atau produser lapangan yang harus mengarahkan juru kamera.

Inti kerja jurnalistik televisi disajikan secara bertahap, yaitu bagaimana cara mencari berita televisi (bab 2),

bagaimana mengumpulkan bahan berita televisi (bab 3), bagaimana mengambil gambar berita televisi (bab 4), bagaimana menentukan format berita televisi (bab 5) dan bagaimana menulis berita televisi (bab 6). Paparan pada bab-bab tersebut menunjukkan betapa banyak hal teknis yang harus dikuasai reporter televisi.

Sebagai jurnalis televisi, reporter pun harus menguasai teknik pengambilan gambar, meskipun di lapangan ia bekerja bersama juru kamera. Ini mendasar, karena gambar adalah primadona dalam jurnalistik televisi. Dan gambar harus serasi dengan cerita. Oleh karena itu, penguasaan teknik pengambilan penting bagi jurnalis televisi. Penguasaan teknik ini dibutuhkan agar ia bisa mengarahkan juru kamera (hal 36).

Untuk menghadirkan atau menulis berita televisi jurnalis atau reporter televisi harus menentukan format berita

seperti apa yang akan dibuat. Penentuan harus disesuaikan bahan berita yang diperoleh. Format berita televisi yaitu *reader* yang merupakan format paling sederhana (reporter cukup menulis lead in/teras berita untuk dibacakan presenter/penyiar), *Voice Over (VO)*, *Voice Over-Grafik (VO-GRAFIK)*, *Sound on Tape (SOT)*, *Voice Over-Sound on Tape (VO-SOT)*, *Package (PKG)*, *Live on Cam (LOC)*, *Live on Tape (LOT)*, *Live by Phone*, *Visual News* dan *Vox Pop*.

Di buku ini penulis memaparkan pada situasi bahan berita dan situasi seperti apa jurnalis atau reporter televisi menentukan pilihan format beritanya.

Ketika format sudah ditentukan, jurnalis televisi harus menentukan judul berita, menulis lead in dan tubuh berita. Penulis secara sederhana menjelaskan disertai contoh-contoh bagaimana menyusun semua itu dalam sebuah *script* berita.

Dan di luar semua kemampuan teknis yang harus dikuasai betul jurnalis televisi, penulis menekankan pentingnya kemampuan perencanaan. Agar bisa merencanakan liputan maka tak ada pilihan lain bagi jurnalis televisi agar selalu membaca, berdiskusi dan mengikuti perkembangan peristiwa dan masalah dari berbagai sumber, termasuk surat kabar dan televisi lain. (*ded*)



Judul Buku	: Jurnalistik Televisi: Teknik Memburu dan Menulis Berita
Penulis	: Arifin S Harahap
Penerbit	: PT. Indeks
Tahun	: 2007
Halaman	: vii, 79

# USIA TAK JADI PENGHAMBAT

DI antara peserta program warga bermedia LP3Y-Ford Foundation, khususnya untuk program koran warga, sosok Tien Ratmanto terlihat paling menonjol, terutama jika dilihat dari faktor usia. Ya, dialah peserta yang boleh disebut tertua jika dibandingkan dengan peserta lain, yang semuanya adalah perempuan. Sosok itu adalah Tien Ratmanto, warga Joho, Banguntapan, Bantul.

Sejak aktif bergabung dalam program ini Mei 2010 lalu, Tien tak pernah absen mengikuti semua pelatihan yang diadakan LP3Y. Satu demi satu latihan, mulai dari latihan memilih kata, merangkainya, membuat kalimat, menyusun kalimat hingga menjadi sebuah paragraf dan bangunan cerita, juga meliputi, selalu diikuti Tien dengan tekun penuh semangat. Tak pernah terdengar keluhan apapun dari sosok yang murah senyum ini. Faktor jarak misalnya. Rumahnya di Joho, berjarak sekitar 30 kilometer dari kantor LP3Y, bukan jadi hambatan. Tak sekalipun Tien absen.

Kegigihan, ketekunan dan ketelatenan Tien tentunya bisa menjadi inspirasi bagi peserta lain yang masih tersisa. Sebab, beberapa yang lain sudah “rontok” di tengah jalan pada satu atau dua bulan pertama pelatihan.

Lantas, apa ada rahasia atau resepnya? “Semua saya lakoni dengan senang hati. Tidak ada resep apa-apa. Saya tidak merasa terbebani karena selalu ingin mengetahui hal baru,” ujar pemilik nama lengkap Kartinah itu, ditemui suatu hari di rumahnya, Dusun Joho, Jambidan, Banguntapan, Bantul.

Tertarik pada hal baru, selalu memiliki rasa ingin tahu, adalah kunci yang terpatri pada jiwa Tien. Latar belakang profesinya sebagai guru, agaknya mendorong dirinya untuk selalu ingin mengetahui banyak hal yang tentu saja akan dan mengasah dirinya untuk terus berpikir.

Kartinah yang lahir di Joho 25 Mei 1942 itu, adalah seorang pensiunan guru pada SD Kretek Lor, Jambidan, Banguntapan, Bantul. Kariernya sebagai guru terentang sejak



Foto: May/LP3Y

tahun 1963 hingga pensiun sebagai pegawai negeri pada 2002 dengan golongan IV B.

Sang suami, Ratmanto, juga selalu mendukung dan mendorong sepenuhnya apapun aktivitas yang dilakukan Tien. Termasuk kegiatan di luar rumah, mulai dari aktif sebagai anggota di berbagai perkumpulan di desanya, antara lain ikuti kelompok karawitan, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan juga kelompok PKK.

Menurut ibu dua anak dan nenek tiga cucu yang pandai memasak dan menjahit itu, semua kegiatan di luar rumah pasti bermanfaat. Paling tidak, selain bisa menambah pengetahuan, juga bisa dibagikan dan bermanfaat bagi sesama. Apalagi kini waktunya

tidak lagi dibebani dengan tugas mengajar, sebagai seorang guru. Sehingga banyak memiliki waktu luang. Selain itu anak-anaknya juga sudah dewasa, *mentas* semua. Si sulung, Joko Purwanto (48) memberinya seorang cucu, adalah guru di sebuah sekolah menengah. Anak kedua, Priyo Dwi Kurnianto (40), memberinya dua cucu, bekerja di Balai Desa Jambidan. “Kegiatan kami berdua sekarang, ya, hanya momong cucu,” tambah Ratmanto, yang punya hobi sama dengan Tien, yakni selain membaca juga berorganisasi dan berkesenian.

Tien Ratmanto, anak ketiga dari 12 bersaudara itu mengaku, walaupun ada kendala selama aktif mengikuti program ini adalah lupa. “Entah mengapa, saya ini sekarang *kok* sering lupa, ya. Tapi, secara fisik bagus, tidak ada halangan,” ujar lulusan SPG tahun 1969 itu. Pernyataan soal fisik yang masih terjaga itu pun ada buktinya. Sampai sekarang Tien masih gesit mengendarai sepeda motor seorang diri, menembus lalu lintas Yogya yang kian semrawut, menempuh jarak berkilometer. Suatu saat dari rumahnya dia menuju ke LP3Y untuk mengikuti pelatihan. Kali lain ia harus berkeliling di wilayah Bantul. Masih prima, memang. Faktor usia, bagi Tien Ratmanto, tak jadi penghambat untuk terus aktif. (*awd*)